

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Sartono Kartodirdjo
Marwati Djoened Poesponegoro
Nugroho Notosusanto

V

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1975

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

V

JAMAN KEBANGKITAN
NASIONAL
DAN
MASA AKHIR HINDIA
BELANDA

Editor :

Yusmar Basri

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1975

Sejarah Nasional Indonesia

- Jilid I Jaman Prasejarah di Indonesia
- Jilid II Jaman Kuno (1 M + 1500 M).
- Jilid III Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia (\pm 1500 \pm 1800)
- Jilid IV Abad Kesembilanbelas (\pm 1800 - 1900)
- Jilid V Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (+ 1900 -- 1942).
- Jilid VI Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia (+ 1942 - 1970).

P R A K A T A.

Jilid V dari Buku Sejarah Nasional ini memuat satu periode dari Sejarah Nasional Indonesia yakni periode Pergerakan Nasional. Periode ini merupakan zaman yang amat penting dalam sejarah perjuangan bangsa, di mana kaum terpelajar Indonesia sebagai pemimpin-pemimpin Indonesia baik yang tergabung dalam partai politik maupun organisasi massa berjuang untuk meniadakan diskriminasi politik dan sosial-budaya serta membulatkan cita-cita kebangsaan dalam rangka mengantarkan Rakyat Indonesia ke gerbang Kemerdekaan. Adalah tidak mudah untuk menggambarkan semua kegiatan pergerakan rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan kolonialis Belanda, bila diingat terbatasnya waktu dan riset yang diperlukan untuk menghasilkan buku ini.

Berdasarkan bahan yang diperoleh dari Prof.Dr.Sartono Kartodirdjo, Dr.Taufik Abdullah dan Drs.Abdurrachman Surjomihardjo di samping yang kami kumpulkan sendiri, diusahakan untuk menghasilkan buku Jilid V ini sesuai dengan pandangan Indonesia-centric. Disadari bahwa hasil yang dicapai belum sebagaimana yang diharapkan. Masih banyak hal-hal yang berhubungan dengan periode ini belum tercakup.

Akhirnya ke pada semua pihak yang membantu hingga terbitnya buku ini kami ucapkan terimakasih. Diharapkan agar buku ini dapat berfaedah bagi kita semuanya.

Yusmar Basri

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	
POLITIK KOLONIAL BELANDA DAN TRANSFORMASI POLITIK	
A. DARI VOC KE PEMERINTAH BELANDA	
1. <i>Sistim tanam-paksa</i>	1
2. <i>Politik etis</i>	14
3. <i>Gagasan-gagasan baru mengenai fungsi jajahan</i>	33
B. PERKEMBANGAN POLITIK KESEJAHTERAAN, 1900 - 1918	
1. <i>Kemerosotan politik etis dan politik asosiasi</i>	58
2. <i>Politik konservatif dan politik progresif</i>	68
3. <i>Politik sistim Barat -- Timur dan politik terhadap Islam</i>	73
4. <i>Kegagalan politik etis</i>	78
C. POLITIK REAKSIONER, 1918 - 1930	
1. <i>Janji van Limburg Stirum</i>	80
2. <i>Politik penindasan</i>	82
D. DASAWARSA TERAKHIR HINDIA BELANDA (1930 - 1942)	
1. <i>Dalam bayang-bayang depresi ekonomi dunia</i>	86
2. <i>Meningkatnya politik reaksioner</i>	89
3. <i>Frustrasi pada pihak Pergerakan Nasional</i>	92
4. <i>Politik non-akulturatif</i>	97

BAB II

STRUKTUR SOSIAL

A. STRUKTUR SOSIAL EKONOMIS

1. <i>Pertumbuhan penduduk</i>	99
--------------------------------	----

2. <i>Kepadatan penduduk dan gejala sosial-ekonomis</i>	104
3. <i>Pelebaran diferensiasi kerja</i>	112
4. <i>Migrasi intern dan extern</i>	116
B. PENYEBARAN PENGAJARAN DAN MOBILITAS SOSIAL	
1. <i>Pendahuluan</i>	124
2. <i>Pertumbuhan sekolah pemerintah dan bersubsidi</i>	128
3. <i>Perguruan Tinggi : dalam dan luar negeri</i>	134
4. <i>Sekolah swasta yang tak bersubsidi</i>	141
5. <i>Latarbelakang sosial dari murid-murid sekolah pemerintah</i>	145
6. <i>Sekolah, kesempatan kerja dan mobilitas sosial</i>	149
C. PERALIHAN STATUS SOSIAL	
1. <i>Pendahuluan</i>	154
2. <i>Pelebaran birokrasi dan Indonesianisasi dalam kepegawaian</i>	158
3. <i>Status sosial : lingkungan supra-desa</i>	163

BAB III

PERGERAKAN NASIONAL

A. AWAL PERKEMBANGAN	
1. <i>Boedi Oetomo</i>	181
2. <i>Sarekat Islam</i>	187
3. <i>Indische Partij</i>	189
4. <i>Gerakan Pemuda</i>	194
B. MASA RADIKAL	
1. <i>Perhimpunan Indonesia</i>	199
2. <i>Partai Komunis Indonesia</i>	202
3. <i>Partai Nasional Indonesia</i>	214
C. MASA BERTAHAN	
1. <i>Fruksi Nasional</i>	222
2. <i>Petisi Sutardjo</i>	225
3. <i>Gabungan Politik Indonesia</i>	235

BAB IV

KOMUNIKASI SOSIAL DAN EDUKASI

A. MENDIDIK BANGSA SENDIRI

1. Pendidikan wanita	243
2. Taman Siswa	250
3. Sekolah Sarekat Islam	263
4. Ksatrian Instituut	269
5. Ruang Pendidik INS – Kayutanam	275
6. Perguruan Rakyat	280

B. INDONESIA DAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI IDENTITAS BANGSA

1. Perkembangan Bahasa Indonesia	285
2. Indonesia: Identitas Bangsa	290

C. PERKEMBANGAN PERS INDONESIA

1. Perkembangan awal : pers daerah dan bahasa Melayu	296
2. Pers pembawa suara organisasi politik	307
3. Sebuah pandangan profesional	314
4. Masa akhir Hindia Belanda	316

B A B I

POLITIK KOLONIAL BELANDA DAN TRANSFORMASI POLITIK

A. DARI VOC KE PEMERINTAH BELANDA

1. *Siasat Tanam Paksa*

Pada pergantian abad secara resmi pemerintah Indonesia pindah dari tangan VOC ke tangan pemerintah Belanda. Setelah pada tahun 1795 ijin (oktroi)-nya ditiadakan pada tahun 1798 VOC dibubarkan dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta *gulden*.

Kemunduran serta kebangkrutan VOC yang telah berjalan sejak awal abad 18 disebabkan oleh pelbagai faktor, antara lain pembukuan yang curang, pegawai yang tidak cakap dan korup, hutang besar, lagi pula sistim monopolinya serta sistim paksaan dalam pengumpulan bahan-bahan/hasil tanaman penduduk menimbulkan kemerosotan moral baik para penguasa maupun dari penduduk yang sangat menderita dalam sistim paksaan itu. Perlu ditambahkan bahwa perang Belanda dengan Inggris untuk merebutkan hegemoni perdagangan mengakibatkan kerugian besar sekali sehingga mempercepat kebangkrutan VOC.

Kepindahan tampuk pemerintahan ke pemerintah Belanda tidak dapat diharapkan membawa perbaikan karena pemerintah Belanda menghadapi perang-perang yang dilancarkan oleh negara-negara besar tetangganya. Pada waktu negeri Belanda dikuasai oleh pemerintah boneka dari kekaisaran Perancis di bawah kaisar Napoleon, Inggris mendapat kesempatan meluaskan daerah jajahannya dengan merebut jajahan Belanda. Dalam masa antara 1800 dan 1816, waktu Indonesia dikembalikan kepada Belanda, tidak ada perubahan sistim pemerintahan yang berarti; sistim dagang tetap dipertahankan dengan penyerahan-paksa serta kontingen seperti yang telah dijalankan VOC selama beberapa abad dan ternyata cara eksploitasi yang membuat daerah jajahan produktif.

Sementara itu pergolakan di Eropa sebagai akibat dari Revolusi Perancis juga meluaskan pengaruhnya terutama dalam bentuk gagasan serta cita-cita liberal. Kaum liberal dikalangan

pemerintah Belanda, antara lain yang mempunyai pembicaranya Dirk van Hogendorp melancarkan gagasan baru dalam menjalankan politik kolonial, yaitu yang didasarkan atas kebebasan dan kesejahteraan umum dari penduduk. Mereka mengusulkan pemerintahan langsung serta sistim pajak. Pertentangan timbul antara kaum progresif yang menganjurkan politik liberal dengan dasar humanitarisme dengan kaum konservatif yang mempertahankan sistim dagang dari politik VOC. Dalam pertentangan itu akhirnya faktor yang menentukan ialah keadaan di negeri Belanda sendiri. Karena perang yang dialami secara berturut-turut telah membawa kemunduran perdagangannya karenanya, keadaan ekonomi negeri Belanda sangat menyedihkan. Tambahan lagi sebagai negeri pertanian dimana industri masih terbelakang, fungsi dari negeri jajahannya tidak lain darinya sebagai penghasil hasil tanaman yang dapat dijual dipasaran Eropa. Sementara itu Inggris merupakan saingan yang kuat karena dengan kemajuan industrinya dapat membanjiri daerah-daerah jajahannya dengan barang-barang industri itu.

Politik kolonial sejak 1800 sampai kira-kira 1870 terombang-ambing antara dua gagasan, sistim dagang dan sistim pajak. Kenyataan dari kondisi negeri induk pada satu pihak dan situasi negeri jajahan mendorong penguasa kolonial kepada politik kolonial konservatif yang menguntungkan serta yang menurut keadaan mungkin dilaksanakan. Dalam perkembangan selanjutnya sejajar dengan kemajuan industri negeri Belanda serta bersamaan dengan kemenangan kaum liberal, secara lambat laun tokoh-tokoh seperti Daendels dan Raffles dapat diterangkan tidak lain karena idealisme mereka yang memperjuangkan kebebasan perseorangan, milik tanah, kebebasan bercocok-tanam, berdagang, bekerja menggunakan hasil tanamannya, kepastian hukum, dan peradilan yang baik, bertentangan dengan keadaan masyarakat yang sangat feodalistis. Daendels (1808 - 1811) sebagai seorang revolusioner dan sangat mendukung perubahan-perubahan liberal, bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dan memajukan pertanian dan perdagangan. Lain daripada itu Daendels juga bertindak untuk mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris.

Sebagai langkah yang sangat luas pengaruhnya, Daendels melakukan perombakan sistim pemerintahan secara radikal. Diletakkan dasar-dasar pemerintahan menurut sistim Barat.

Pemerintahan dipusatkan, Jawa dibagi atas daerah-daerah – *prefectuur* – yang dikepalai oleh seorang prefek yang langsung ada dibawah perintah Wali negara. Pengadilan pribumi diperluas dan diperbaharui, para bupati diberi kedudukan sebagai pegawai pemerintah meskipun masih mempunyai kekuasaan feodal. Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dijadikan daerah gubernemen/pemerintah; pelbagai upacara di istana Surakarta dan Yogyakarta disederhanakan. Secara tegas Daendels memberantas kericuhan-kericuhan yang terjadi dalam soal pemungutan kontingen dan penyerahan-paksa dan soal kerja-paksa. Usaha Daendels dalam perombakan sistim feodal gagal oleh karena kepentingan pemerintahnya untuk mempertahankan pulau Jawa terpaksa mengadakan pengerahan tenaga secara besar-besaran dan menurut pola tradisional yang ada pada awal pemerintahannya sangat ditentangnya.

Betapapun giatnya Daendels membangun sistim pertahanan di Jawa, namun tidak lama sesudah kepergiannya, Jawa jatuh ketangan Inggris dan menjadi bagian dari daerah jajahannya India.

Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jendral untuk mewakili raja muda Lord Minto. Seperti Daendels, Raffles mempunyai keyakinan akan kebaikan sistim pemerintahan Barat. Hendak dihapuskannya penyerahan paksa dan jasa-jasa – perseorangan, dan diadakan kebebasan bercocok-tanam dan berdagang. Berhubungan erat dengan ini juga diusahakannya untuk membatasi kekuasaan para bupati hanya sebagai pegawai dalam arti Barat dan sebagai pemungut pajak. Sebagai pembaharuan besar yang dilakukan ialah pemungutan pajaktanah. Menurut peraturannya dari hasil semua penanaman sawah dipungut $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$ atau $\frac{1}{3}$ dari hasil panen besar (bruto) dalam bentuk uang atau beras. Pemungutan dilakukan secara perseorangan. Dalam pelaksanaannya sistim ini mengalami bermacam-macam kesulitan, antara lain karena belum ada pengukuran tanah yang tepat, lagipula tidak diperhitungkan hak-milik atas tanah seperti yang berlaku menurut adat. Pemungutan terpaksa dilakukan lewat/melalui pegawai-pegawai yang korup dan bertindak secara sewenang-wenang. Sebab pokok ialah bahwa ekonomi desa belum memungkinkan petani memperoleh uang sebagai ganti dari hasilbuminya. Menurut kenyataannya perkembangan sedemikian sehingga baru lebih kurang 100 tahun kemudian

sistim pajak-tanah itu dapat dilaksanakan. Pengembalian Jawa/Indonesia kepada Belanda pada tahun 1816 menghadapkan pemerintah Belanda kepada persoalan sistim yang dipergunakan agar daerah jajahan memberi keuntungan sebanyak-banyaknya kepada negeri induknya. Masa sampai 1830 diliputi oleh pertentangan-pertentangan antara kaum liberal dan konservatif¹, yang pertama mempertahankan bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan sistim perusahaan kapitalistis Barat sedang yang kedua condong untuk menjalankan sistim pemungutan hasil tanaman. Kaum liberal menolak sistim pemerintahan yang menerima hasil tanaman sebagai pajak atau pungutan paksa, sedangkan hal itu dapat diserahkan kepada/masuk kedalam bidang perdagangan. Kekuatan politik kolonial Inggris dipakai sebagai contoh oleh mereka tanpa mengingat kenyataan bahwa negeri Belanda sangat lemah ekonominya. Kondisi ini yang menimbulkan keragu-raguan pada kaum konservatif terhadap prinsip liberal, *laissez-fair*, *laissez-passer*. Para Komisariss Jenderal, Gubernur Jenderal Van der Capellen dan Du Bus de Gisignies yang berniat melakukan politik yang melindungi hak-hak anak pribumi serta memperbaiki nasibnya terpaksa meneruskan politik eksploitasi untuk memberi keuntungan dari daerah jajahan untuk negeri induk, sokongan keuangan yang diharapkan.

Dengan tidak melepaskan tujuan pokok politik kolonial ialah eksploitasi daerah jajahan bagi negeri induk, mereka mencari cara-cara bagaimana prinsip kebebasan masih dapat dilaksanakan. Komisariss Jendral dan van der Capellen menjalankan politik-perlindungan rakyat dan tidak semata-mata menjalankan politik (non intenvensi) yang akan merugikan masyarakat pribumi sebagai pihak yang lemah. Perusahaan-perusahaan swasta Barat tidak dihalang-halangi atau dibatasi usahanya selama tidak membahayakan/mengancam kehidupan penduduk. Hak-hak milik yang tidak terbatas bagi pengusaha Barat dan sistim pungutan paksa dari VOC ditolaknya. Politik Komisariss Jenderal terhadap pertanian penduduk pribumi ternyata dualistis. Pada satu pihak masih dipertahankan sistim pungutan hasil tanaman lewat para pengusaha pribumi dengan pengawasan yang lebih ketat, sehingga hasil untuk pasaran terjamin tanpa membiarkan penduduk ditekan oleh penguasa-penguasa. Disamping itu pengusaha Barat

1 Lihat D.W. Welderen-Rengers, *The Failure of a Liberal Colonial Policy, Netherlands East Indies, 1816-1830*. The Hague, 1974, hal 132-152.

diberi keleluasaan untuk membuka perkebunan dan perusahaan pertaniannya. Berbeda dengan Raffles, mereka masih mempertahankan kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal dan tidak karena semata-mata sebagai pegawai pemerintah kolonial. Kegagalan Raffles dalam memasukkan sistim pajak-tanah terletak pada peranan yang hendak diberikan kepada perseorangan dalam sistim itu, Komisaris Jenderal mempertahankan desa sebagai kesatuan dan menggunakan para penguasa sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pemungutan hasil.

Masalah pembukuan perusahaan Barat menyangkut masalah kebebasan dan prinsip ekonomi liberal pada satu pihak dan masalah perlindungan hak-hak rakyat terhadap eksploitasi dari pihak yang ekonomis kuat. Yang menjadi pokok persoalan dalam hal ini ialah :

- (1) hak penduduk atas *tanah* yang termasuk hak dari desanya.
- (2) pengerahan *tenaga* dari penduduk diluar kebiasaan tradisionil.

Oleh karena pembukaan (penyelenggaraan) perusahaan Barat kurang mengetahui atau tidak mengindahkan hukum adat yang berlaku, timbullah kegelisahan dan kerusuhan-kerusuhan antara lain di Cirebon pada tahun 1816, diantara cara-cara pengusaha dirasakan sangat menekan. Para Komisaris Jenderal, Elout dan Muntinghe melihat bahaya bagi penduduk desa serta tenaganya di daerah-daerah berpenduduk padat, dimana usahawan-usahawan Barat membuka perusahaannya, yang akan merusak hak-hak milik penduduk serta memeras tenaga rakyat itu.

Bagaimana prinsip-prinsip liberal dapat dijalankan tanpa melanggar hak-hak penduduk ? Pemecahan persoalan ini sebelum 1830 dan sesudahnya tidak terlepas dari kepentingan pokok dari pemerintah kolonial, ialah eksploitasi daerah jajahan untuk memberikan hasil kepada negeri induk. Dalam hubungan ini gagasan liberal merupakan cita-cita yang dapat mengurangi kecenderungan untuk memakai sistim eksploitasi cara VOC meskipun pelaksanaannya baru benar-benar terwujud pada tahun 1870. Proses yang amat lambat ini tidak lain disebabkan karena situasi ekonomis negeri induk dan kondisi masyarakat pribumi sendiri.

Politik van der Capellen berkisar sekitar masalah penggunaan tanah bagi pengusaha-pengusaha Barat. Apakah van der

Capellen menentang semua jenis perusahaan Barat atau hanya yang merugikan masyarakat pribumi? Untuk menjamin hak pribumi maka tindakan penting yang dilakukan ialah menghapuskan sewa tanah ditanah kerajaan pada 1823, sedangkan penghentian penyewaan telah dilakukan sejak 1821. Akibat dari peraturan ini tidak hanya menyangkut para pengusaha perkebunan, tetapi juga melibatkan para bangsawan istana yang telah menerima pembayaran lebih dahulu untuk jangka waktu yang cukup lama. Kegelisahan dikalangan bangsawan itu membuat suasana semakin buruk sehingga semakin kuat kecenderungan untuk memberontak. Tambahan pula, sistim penggadaian pelbagai *tol* kepada Cina sangat memeras rakyat dan mengeruhkan suasana pula. Kedua golongan menjadi pendukung kuat dari gerakan Pangeran Diponegoro yang mulai melancarkan serangannya terhadap Belanda pada tahun 1825. Du Bus de Gisignies dengan dibantu oleh van Hogendorp menempuh politik terhadap tanah dan tenaga yang berlawanan, dengan politik yang dilakukan oleh Komisaris Jenderal dan van der Capellen. Kecuali desa-desa yang telah berdiri pada waktu peraturan dijalankan (1816), soal penyewaan tanah bagi pengusaha Barat tidak boleh dibatasi. Oleh van Hogendorp disadari kenyataan bahwa tanah yang belum dibuka untuk pertanian hanya dapat digunakan untuk perkebunan apabila terletak dekat desa sehingga terjamin akan memperoleh tenaga kerjanya. Tenaga kerja sudah diperoleh selama penduduk desa ingin tetap menjadi petani yang bebas. Apabila tanah persediaan desa dipakai untuk pengusaha asing, penduduk desa yang semakin bertambah banyak terpaksa mencari pekerjaan pada perkebunan itu.

Politik van Hogendorp ini disangsikan apakah akan secara cepat dapat memberi hasil bagi negeri induk. Dipandang dari segi kepentingan rakyat, sistim ini mengabaikan samasekali hak-hak rakyat atas tanah dan tidak memberi perlindungan kepada mereka dalam mengadakan hubungan antara majikan-majikan Barat. Jadi sistim perusahaan kapitalistis Barat diharapkan akan memberi keuntungan tanpa memperhatikan atau memperhitungkan akibat-akibatnya bagi rakyat. Apakah akibat bagi rakyat, rupanya tidak dapat mempengaruhi politik kolonial pada waktu itu. Yang sangat menentukan ialah keadaan di negeri induk sendiri yang semakin memerlukan sumber-sumber kekayaan dari daerah jajahannya. Usul van den Bosch diajukan yang menyarankan

kan suatu sistim yang memberi keuntungan dengan jalan menggunakan jalan yang sesuai dengan adat-istiadat masyarakat pribumi. Selama periode antara 1516 dan 1830 penyusun politik kolonial Belanda mengalami kegagalan dalam mengeterapkan cita-cita liberal dalam hubungannya dengan daerah jajahan, tidak hanya karena kurang pengertiannya/perhatiannya terhadap masyarakat tradisionil di Jawa, tetapi juga karena tugas utamanya ialah menjalankan exploitasi daerah jajahan untuk memberi keuntungan bagi negeri induknya. Pelbagai jalan tengah mengecewakan hal terakhir ini, maka akhirnya apa yang disarankan sebagai sistim tanam-paksa oleh van den Bosch dapat dilaksanakan oleh karena memberi harapan yang paling baik untuk negeri induk.

Pada tahun 1830 keadaan, baik di Indonesia maupun di negeri Belanda, sangat memburuk. Hutang semakin besar untuk menutup biaya perang Belgia dan perang Diponegoro. Maka untuk menghindari kebangkrutan, Jawa diharapkan memberi hasil cukup untuk mengisi kekosongan kas itu. Van den Bosch hendak memusatkan politik kolonial pada produksi. Disadari bahwa negeri Belanda tidak mempunyai perdagangan, perkapalan dan pabrik pada waktu itu. Yang diperlukan ialah menggunakan tenaga rakyat untuk penanaman hasil² yang dapat dijual di pasaran dunia tidak secara bebas tetapi dengan *sistim-paksa*, jadi bukan sistim penanaman bebas atau kolonisasi bagi bangsa Eropa.

Untuk keperluan mempertinggi produksi itu pribumi diharuskan membayar pajaknya dalam bentuk hasil yang dapat dijual sebagai export ke pasaran di negeri Belanda yang perlu dijadikan lagi pusat perdagangan dunia bagi hasil-hasil tropis. Kecuali itu industri di negeri Belanda perlu dihidupkan/diperkembangkan sehingga hasilnya akan dilemparkan ke Indonesia: Pelayaran dan pengangkutan akan ada di tangan perkapalan Belanda sendiri. Sistim tanam-paksa yang diusulkan van den Bosch merupakan gabungan antara sistim Priyangan dan sistim pajak tanah. Setiap desa diharuskan menanam 1/5 dari tanahnya dengan jenis tanaman yang hasilnya dapat di-export dengan mendapat kebebasan bayar-pajak tanah². Setiap kelebihan hasil

² Lihat Clive Day, *The policy and Administration of the Dutch in Java*, New York, 1904, hal. 249-250; dan periksa J.E. Stokvis, *Van Wingewest naar Zelfbestuur in Nederlandsch-Indie*, Amsterdam, 1912, hal. 88-95.

tanaman dari jumlah pajak yang harus dibayar dibayarkan kembali kepada desa. Kegagalan panen akan menjadi tanggungan pemerintah. Wajib tanaman-paksa dapat diganti dengan pencurahan tenaga untuk pengangkutan dan pekerjaan di pabrik.

Pada tahun 1831 van den Bosch memerintahkan penanaman nila, gula dan kopi. Sejak 1833 semua kopi wajib diserahkan kepada pemerintah, kelebihan hasil dan yang diwajibkan sebagai pajak harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan olehnya. Meskipun usaha-usaha swasta masih diijinkan berdiri, seperti Tanah Swasta, Konsesi, dan Hadiah-hadiah, namun Sistem Tanam-paksa berkembang sebagai usaha berskala besar sekali, dengan Pemerintah sebagai pengusaha dengan Nederlandsche Handels Maatschappij sebagai agen tunggal: Pulau Jawa menjadi suatu usaha negara yang besar !

Peraturan-peraturan Tanam-paksa dalam pelaksanaannya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang memberatkan beban rakyat. Telah terjadi bahwa bagian yang ditanami untuk tanaman-paksa melebihi dari $\frac{1}{5}$, umpamanya sampai $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{2}$, kadang-kadang seluruh tanah desa itu. Pembayaran untuk setoran gula dibayar menurut apa yang dihasilkan pabrik dan tidak menurut jumlah tebu yang diserahkan. Banyak tenaga yang tidak dibayar. Kegagalan panen sering ditanggung oleh petani sendiri. Pekerjaan yang dilakukan di pabrik tiga kali lebih berat dari pekerjaan di sawah; jumlah pohon kopi diperbanyak secara sewenang-wenang, dari 250 sampai 1000, penanam kopi dikumpulkan dalam tempat konsentrasi; seringkali rakyat dipindahkan ke tempat-tempat yang jauh dari desanya; pekerjaan berat diperlukan untuk pengangkutan, mengolah hasil di pabrik, membuat jalan saluran air dan jembatan, kesemuanya tanpa upah.

Sementara itu hasilnya telah dapat mengisi kekurangan perbendaharaan negeri Belanda, memberi banyak keuntungan bagi usahawan, para pegawai menerima uang komisi banyak.

Karena tidak didasarkan atas pengetahuan serta pengalaman tentang penanaman kopi, telah terjadi bahwa selama lima tahun lebih kurang 2000 orang perlu menanam dan memelihara kebun-kebun kopi yang letaknya 28 mil dari tempat tinggalnya. Hasilnya ternyata hanya tiga pikul kopi seharga 36 gulden.

Di daerah Rembang pada suatu waktu 34.000 keluarga selama 8 bulan dalam satu tahun harus bekerja untuk tanam-

paksa dengan menerima upah hanya tiga duit sehari. Untuk keperluan penanaman tembakau, rakyat diharuskan menyerahkan balok, bambu, kayu untuk los-los tembakau.

1. Sistem yang dimaksudkan sebagai usaha persetujuan yang sukarela, pada kenyataannya menjadi suatu paksaan. Dengan pemberian prosenan kultur kepada para petugas, maka mereka berusaha keras mempertinggi produksi dengan menggunakan kekuasaannya. Dalam hubungan ini rakyat ditekan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya.
2. Jumlah orang yang dikerahkan untuk penanaman ini sangat besar, kira-kira meliputi 80.000 keluarga atau lebih kurang 4 juta orang; ini berarti bahwa kira-kira, terlepas dari penanaman kopi, 1/4 dari penduduk, dan 1/13 dari tanah bercocok-tanam terlibat dalam usaha itu.
3. Beberapa jenis tanaman seperti nila di daerah Priyangan. Di distrik Simpur semua orang lelaki dari beberapa desa dikerahkan selama 7 bulan untuk menanam nila, jauh dari rumahnya. Kecuali itu dari distrik itu dikerahkan 5000 orang laki-laki dengan 3000 kerbau selama 5 bulan untuk mengerjakan tanah bagi pabrik.
4. Dari penyelenggaraan tanam-paksa ternyata bahwa tanah yang dipakai untuk itu bebas dari pajak tanah akan tetapi orang-orangnya tetap kena pajak tanah, terbukti dari angka-angka jumlah pajak-tanah yang semakin meningkat sejak 1829.
5. Selisih antara pajak yang harus dibayar dengan nilai yang ditaksir dari hasil yang diserahkan, menurut peraturan harus dibayarkan kepada rakyat, akan tetapi dalam kenyataannya hanya sedikit sekali yang dibayarkan. Dari penanaman tebu, petani hanya mendapat upah menurut jumlah berat gula yang dihasilkan.

Beberapa kejadian seperti kelaparan di Demak (1848) dan Grobogan (1849) yang mengakibatkan kematian secara besar-besaran membuka mata pemerintah akan penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh tanaman-paksa. Beberapa tokoh-tokoh yang mengenal keadaan di Indonesia mulai melancarkan gerakan untuk penghapusannya, antara lain Vitalis, Bosch dan van Hoevell. Penghapusan kebanyakan dari tanam-paksa dilakukan